

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama pada wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat (Thamrin et al., 2022). Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi secara langsung berdampak pada meningkatnya volume timbulan sampah yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008) Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup (Kehutanan & Perencanaan, 2021). Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis kebersihan semata, melainkan cerminan langsung dari kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dalam memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada skala nasional, persoalan pengelolaan sampah di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 yang bersumber dari 202 kabupaten/kota, jumlah timbulan sampah nasional mencapai 21,1 juta ton. Dari angka tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya sebesar 34,29% atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik (Kementerian Koordinator PMK, 2023). Pada tahun 2023, volume timbulan sampah yang tercatat oleh KLHK bahkan mencapai 30,97 juta ton, meskipun data tersebut baru mencakup laporan dari 280 kabupaten/kota sehingga angka sesungguhnya diperkirakan jauh lebih besar (KLHK, 2024) Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan sampah di setiap tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat kabupaten.

Di tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan beban timbulan sampah terbesar di Indonesia. Berdasarkan data SIPSN KLHK, Jawa Barat menempati posisi ketiga sebagai provinsi penghasil timbulan sampah

terbesar pada tahun 2022, dengan total mencapai 4,89 juta ton . Di dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang signifikan, yakni tercatat 2,58 juta jiwa berdasarkan data tahun 2024 (Databoks, 2024) Dengan besarnya jumlah penduduk tersebut ditambah kondisi geografis yang heterogen mencakup kawasan urban, perdesaan, dan pegunungan data SIPSN tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah harian Kabupaten Cianjur diperkirakan mencapai 1.260 ton per hari (Radar Sukabumi, 2025). Volume timbulan yang sangat besar ini seharusnya diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku penanggung jawab teknis di tingkat daerah.

Pentingnya pengelolaan sampah mendorong pemerintah membentuk berbagai kebijakan dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan di daerah. Pada tingkat nasional, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Di tingkat daerah, kelembagaan DLH Kabupaten Cianjur dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi operasional DLH dalam mengelola persampahan lebih lanjut ditegaskan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. Seluruh mandat regulasi tersebut kemudian diterjemahkan secara strategis dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Cianjur Tahun 2021–2026, dan dioperasionalkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (RENJA) 2022–2024. Capaian akhir dari seluruh perencanaan tersebut wajib dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberadaan

RISPS yang disahkan melalui Perbup Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2024 juga menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah memiliki kerangka perencanaan jangka panjang, dengan target pengangkutan langsung ke TPA pada tahun 2028 sebesar 12,92% (Radar Sukabumi dan ISWMP, 2025).

Guna menilai sejauh mana target dalam dokumen perencanaan tersebut terealisasi, instrumen akuntabilitas kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan sebagai media evaluasi tahunan. LKIP DLH berperan sebagai sumber informasi utama untuk menilai capaian kinerja organisasi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Namun, LKIP yang idealnya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang bersifat diagnostik justru seringkali hanya menjadi dokumen pelaporan administratif yang tidak mampu menjelaskan *mengapa* suatu target tidak tercapai dan *bagaimana* keterkaitan antara perencanaan, sumber daya, proses, dan hasil. Hal ini bertentangan dengan esensi evaluasi kinerja sektor publik yang menekankan penilaian untuk perbaikan berkelanjutan (Poister, 2014)

Berdasarkan observasi awal peneliti terhadap dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur periode 2022–2024, ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) yang konsisten antara target yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan realisasi riil penanganan sampah. Fakta ini menjadi titik tolak pentingnya evaluasi terhadap dokumen kinerja tersebut. Fenomena gap kinerja tersebut terdokumentasi dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Realisasi Kinerja Penanganan Sampah DLH Kabupaten Cianjur Tahun 2022–2024**

<b>Program</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tahun</b>
<b>Penanganan Sampah</b>	20,09%	19,52%	2022
	20,09%	18,87%	2023
	40%	32,17%	2024

Sumber: LKIP DLH Kabupaten Cianjur (2022, 2023, 2024)

Data di atas menunjukkan bahwa target lokal dalam Renstra DLH Kabupaten Cianjur, khususnya pada tahun 2024 yang menetapkan target 40%, masih berada di bawah target nasional sebesar 70%. Namun demikian, target daerah tersebut belum dapat dicapai secara optimal dalam tiga tahun berturut-turut. Belum optimalnya capaian tersebut menunjukkan adanya indikasi kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Kondisi ini selaras dengan adanya hambatan pada aspek ketersediaan dan dukungan sumber daya (*Input*). Berdasarkan dokumen LKIP, permasalahan pada aspek *Input* tersebut dilaporkan secara berulang dari tahun ke tahun, seperti keterbatasan SDM pengawasan lingkungan (PPLH), kapasitas TPA Pasir Sembung yang mengalami overload, serta minimnya pembangunan TPS3R dan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian awal, peneliti menduga bahwa pelaksanaan program pengelolaan sampah DLH Kabupaten Cianjur belum optimal. Hal ini diduga terjadi karena belum dilaksanakannya secara memadai faktor-faktor yang mempengaruhi capaian program, yang meliputi keselarasan konteks perencanaan dengan kebijakan yang berlaku, ketersediaan dan kecukupan sumber daya (*Input*), konsistensi pelaksanaan dan koordinasi (*Process*), serta pencapaian target hasil akhir program (*Product*).

Kondisi gap kinerja yang konsisten tersebut selaras dengan adanya hambatan serius pada aspek ketersediaan dan dukungan sumber daya (*Input*). Berdasarkan dokumen LKIP Kabupaten Cianjur, permasalahan pada aspek *Input* dilaporkan secara berulang dari tahun ke tahun tanpa ada penyelesaian struktural yang signifikan.

Pada sisi infrastruktur, TPA Pasir Sembung mengalami kondisi *overload* dan akhirnya ditutup pada awal tahun 2024, sementara TPA pengganti di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, belum siap difungsikan (Pinusnews.id, 2024) Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 32 unit TPS3R yang telah dibangun juga belum dapat dioperasikan karena diduga bermasalah (Bangbara.com, 2024). Pada sisi sumber daya manusia, dokumen LKIP mencatat secara konsisten bahwa Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) belum tersedia, sedangkan SDM yang ada tidak sebanding dengan jumlah usaha dan kegiatan

yang wajib diawasi. Keterbatasan *Input* ini pada akhirnya mempengaruhi seluruh mata rantai pelaksanaan program: anggaran yang terbatas mengakibatkan pengadaan sarana sulit direalisasikan, armada angkut yang rusak menyebabkan jadwal pengangkutan tidak konsisten, dan PPLH yang tidak ada menyebabkan pengawasan berjalan secara reaktif (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dumai, dalam repository.uir.ac.id, 2022).

Berdasarkan dokumen LKIP, permasalahan pada aspek *Input* ini dilaporkan secara berulang dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 2 Persistensi Masalah "*Input*" DLH Kabupaten Cianjur (2022-2024)**

<b>Isu Strategis (<i>Input</i>)</b>	<b>Kondisi LKIP 2022</b>	<b>Kondisi LKIP 2023</b>	<b>Kondisi LKIP 2024</b>
<b>SDM Pengawasan (PPLH)</b>	Belum adanya PPLH dan kurangnya SDM pendukung.	Belum adanya PPLH dan kurangnya SDM pendukung.	Belum adanya PPLH dan SDM tidak seimbang dengan jumlah usaha.
<b>Sarana TPA</b>	TPA Pasir Sembung <i>overload</i> dan belum ada TPA baru.	TPA Pasir Sembung <i>overload</i> .	Kondisi TPA tetap menjadi masalah pokok ( <i>overload</i> berkelanjutan).
<b>Prasarana 3R/TPS3R</b>	Minimnya pembangunan TPS3R dan sarpras.	Minimnya pembangunan TPS3R dan sarpras.	Minimnya pembangunan TPS3R dan partisipasi masyarakat rendah.

Sumber: LKIP DLH Kabupaten Cianjur (2022-2024), diolah peneliti (2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan dalam dokumen LKIP masih cenderung berfokus pada penyajian capaian dan uraian masalah secara deskriptif dari tahun ke tahun. Dokumen LKIP belum menyajikan penjelasan yang memadai mengenai keterkaitan antara hambatan sumber daya, proses pelaksanaan program, dan capaian kinerja penanganan sampah. Akibatnya, keterkaitan antara perencanaan target, ketersediaan sumber daya, proses

pelaksanaan, dan hasil kinerja belum terlihat secara terintegrasi di dalam dokumen tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen (2011), model CIPP memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menganalisis berbagai aspek program secara sistematis. Selain itu, (Engkus, 2018) menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja yang berkualitas memerlukan penjelasan yang logis mengenai hubungan antara tujuan kebijakan, penggunaan sumber daya, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa studi evaluasi pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi oleh penelitian pada kota-kota besar atau daerah perkotaan dengan kapasitas anggaran yang relatif memadai. Penelitian evaluatif seperti studi terhadap program Jakarta Recycle Centre menggunakan model CIPP dan menemukan bahwa program belum berjalan optimal, dengan tantangan pada jadwal pengangkutan, lemahnya koordinasi, dan minimnya transparansi hasil (Abiyah, dalam [journal.ummat.ac.id](http://journal.ummat.ac.id), 2026). Studi serupa di Kota Depok menghasilkan rekomendasi peningkatan alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD, pemeliharaan rutin sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM (ResearchGate/IKPS Kota Depok, 2024). Sementara itu, studi literatur skala nasional menemukan bahwa disparitas antara kebijakan nasional dan implementasi lokal diperparah oleh kesenjangan kapabilitas institusional, keterbatasan anggaran daerah, dan inkonsistensi koordinasi antarpemangku kepentingan (Nyoman & Yanti, 2026).

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah di kabupaten dengan karakteristik wilayah luas, heterogenitas geografis tinggi, kapasitas anggaran rendah (di bawah 1% APBD), dan menggunakan analisis dokumen *LKIP* sebagai sumber data primer dengan kerangka CIPP seperti konteks Kabupaten Cianjur masih sangat terbatas. Hal ini memunculkan *research gap* dalam kajian administrasi publik, khususnya terkait bagaimana dokumen kinerja pemerintah daerah mampu menyajikan informasi evaluasi yang komprehensif atas penyelesaian masalah strategis daerah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis

kinerja program pengelolaan sampah DLH Kabupaten Cianjur secara holistik dari dimensi *Context, Input, Process, dan Product*.

Dalam konteks ini, penelitian tidak diarahkan untuk mengevaluasi kondisi fisik lapangan secara langsung, melainkan menggunakan dokumen LKIP sebagai sumber data utama yang diperkuat melalui data wawancara dan observasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan Guili Zhang (2017). Melalui model CIPP, peneliti dapat menganalisis bagaimana dokumen LKIP menyajikan informasi keterkaitan antarkomponen kinerja, yang meliputi: (1) *Context*, mengkaji keselarasan target perencanaan lokal dengan mandat kebijakan nasional dan daerah; (2) *Input*, menganalisis ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana; (3) *Process*, menelaah proses pelaksanaan program dan hambatan koordinasi; serta (4) *Product*, menilai realisasi capaian akhir penanganan sampah secara terukur.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep evaluasi kinerja sektor publik yang menekankan penilaian kinerja komprehensif untuk mendukung perbaikan program secara berkelanjutan (Poister, 2014). Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik melalui studi evaluasi berbasis CIPP pada konteks kabupaten yang kurang mendapat perhatian dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan judul: **"Evaluasi Program Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Cianjur Periode 2022–2024"**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan inti yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu:

1. Kesenjangan dalam Perencanaan (*Context*): Dokumen LKIP DLH Kabupaten Cianjur tahun 2022–2024 masih lebih berfokus pada penyajian capaian kinerja dan belum menguraikan secara mendalam konteks permasalahan pengelolaan sampah yang melatarbelakangi

capaian tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi pada aspek context untuk memahami kesesuaian target dan kondisi riil pengelolaan sampah.

2. Keterbatasan dalam Analisis Kinerja (*Product*): LKIP tahun 2022–2024 telah menyajikan informasi capaian kinerja, namun analisis mengenai penyebab kesenjangan antara target dan realisasi kinerja masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pada aspek product untuk menilai capaian hasil program pengelolaan sampah secara lebih mendalam.
3. Kekosongan Analisis Sistemik *Input & Process*: Dokumen LKIP belum menguraikan secara sistematis pengaruh faktor input, seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran, serta faktor process, seperti pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat, terhadap capaian kinerja pengelolaan sampah.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan analisis, permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks (*Context*) kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur dengan kebijakan periode 2022-2024?
2. Bagaimana mengevaluasi kecukupan masukan (*Input*) berupa anggaran, SDM, dan infrastruktur dilaporkan dalam dokumen LKIP DLH Kabupaten Cianjur periode 2022–2024?
3. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas proses (*Process*) implementasi kebijakan pengelolaan sampah, termasuk mekanisme koordinasi, pelaksanaan program di Kabupaten Cianjur?
4. Bagaimana evaluasi terhadap hasil (*Product*) kinerja pengelolaan sampah dalam LKIP periode 2022-2024, dan bagaimana keterkaitannya dengan aspek *Context*, *Input*, dan *Process* dalam menjelaskan kesenjangan kinerja?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Cianjur periode 2022–2024 berdasarkan dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai kerangka analisis. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konteks (*Context*) pengelolaan sampah sebagaimana digambarkan dalam dokumen LKIP DLH Kabupaten Cianjur tahun 2022–2024, khususnya terkait kondisi permasalahan dan latar belakang capaian kinerja pengelolaan sampah.
2. Untuk mengevaluasi kecukupan masukan (*Input*) yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta dukungan sumber daya lainnya yang tercantum dalam dokumen LKIP.
3. Untuk menganalisis proses (*Process*) pelaksanaan program pengelolaan sampah sebagaimana dilaporkan dalam dokumen LKIP, termasuk pelaksanaan kegiatan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
4. Untuk menganalisis hasil (*Product*) kinerja pengelolaan sampah berdasarkan LKIP tahun 2022–2024 serta keterkaitannya dengan aspek *Context, Input, dan Process* dalam menjelaskan capaian kinerja pengelolaan sampah.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan Model CIPP sebagai kerangka evaluasi diagnostik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dan akuntabilitas sektor publik di tingkat daerah. Secara praktis, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menyusun kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih efektif.

#### **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)**

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang analisis kinerja dan akuntabilitas publik melalui penerapan Model CIPP sebagai

kerangka evaluasi yang komprehensif dalam menganalisis dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (LKIP). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa analisis dokumen dapat digunakan sebagai metode evaluasi yang mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kinerja kebijakan publik.

## **2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Praktis)**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek-aspek yang telah berjalan dengan baik serta bagian yang masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait ketersediaan sumber daya, pelaksanaan program, dan capaian kinerja pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kabupaten Cianjur.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berangkat dari fenomena kesenjangan kinerja (*performance gap*) yang terdokumentasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur periode 2022–2024. Masalah utama yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah ketidaktercapaian target penanganan sampah secara konsisten, di mana pada tahun 2024 tercatat selisih negatif sebesar -7,83% (target 40% dengan realisasi 32,17%). Urgensitas penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mendiagnosis mengapa laporan administratif cenderung bersifat formalitas dan tidak sinkron dengan realitas fisik di lapangan.

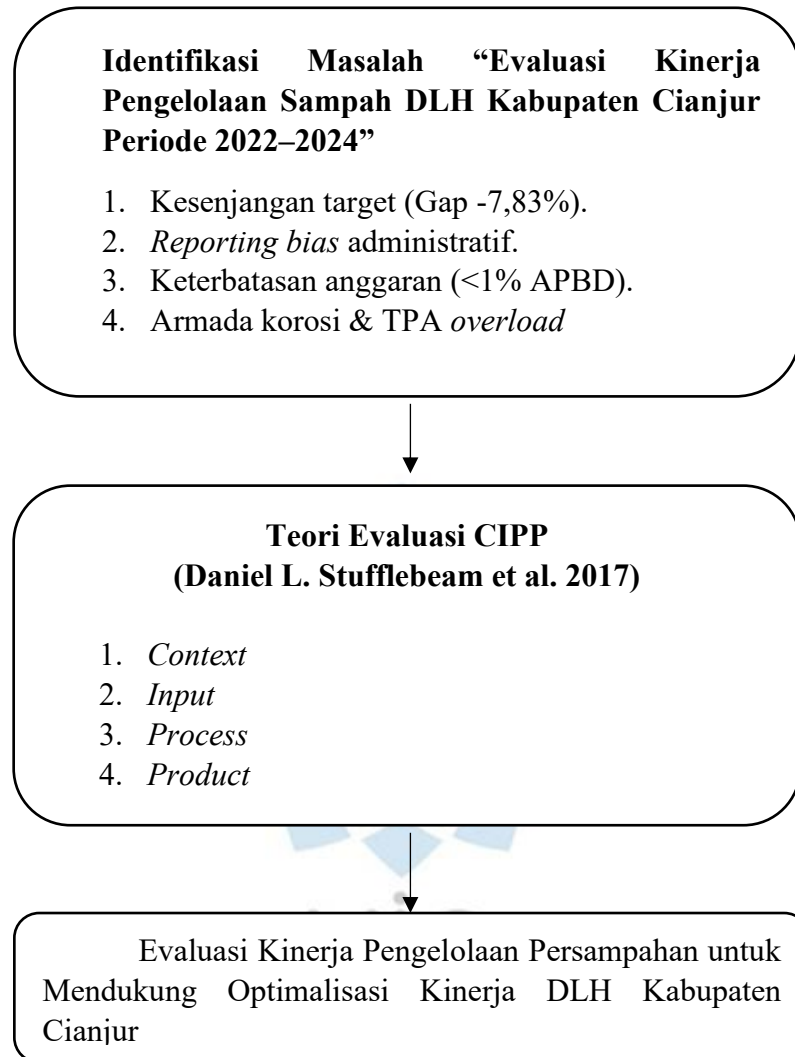
Untuk membedah masalah tersebut, peneliti menggunakan peneliti menggunakan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam et al. (2017) dalam buku *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability* (2017), sebagai pisau analisis penelitian. Model CIPP dipilih karena mampu memberikan evaluasi program secara menyeluruh, tidak hanya menilai hasil

akhir program, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian program tersebut.

1. *Context* mengevaluasi apakah penetapan target dalam dokumen perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*needs relevance*) dan mandat kebijakan.
2. *Input* menganalisis kecukupan sumber daya (anggaran <1% APBD, SDM, dan kondisi armada truk yang korosi) sebagai bahan dasar pelaksanaan program.
3. *Process* menelaah konsistensi pelaksanaan di lapangan serta mekanisme pelaporan digital yang terindikasi mengalami *reporting bias* demi tuntutan administratif.
4. *Product* menilai realisasi capaian akhir dan dampak layanan terhadap kebersihan wilayah sebagai hasil dari integrasi ketiga dimensi sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan capaian kinerja pengelolaan sampah, keterbatasan sumber daya, serta pelaporan kinerja dalam dokumen LKIP yang masih bersifat deskriptif administratif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan evaluasi kinerja program dengan Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam sebagai alat analisis dalam mengevaluasi aspek perencanaan, sumber daya, proses pelaksanaan, dan capaian hasil program pengelolaan sampah.

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**



Sumber: (Stufflebeam & Zhang (2017) diolah Peneliti, 2026)